

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (*E-Parking*). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk mengatasi adanya kebocoran pendapat asli daerah (PAD) sekaligus untuk mengatasi adanya praktik parkir liar, dengan menerapkan sistem parkir elektronik di kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sebagai solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta atau Peraturan Walikota Surakarta untuk mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, melakukan sosialisasi tentang parkir elektronik kepada masyarakat serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta.

Kata Kunci : *Kebijakan, Parkir Elektronik, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Abstract

This research was made because of the new policy that was issued by Surakarta City Government regarding electronic parking system (E-Parking). This policy intended to overcome the existence leakage of regional own-source revenue, and reducing illegal levies practices like withdrawing of parking tariffs that are not in accordance by the Surakarta City Government. Surakarta City Government is trying to overcome the leakage of regional own-source revenue as well to overcome the existence of illegal parking practices, with implementing an electronic parking system in the city of Surakarta. This research uses 2 methods empirical juridical method and data analysis method (analytical descriptive). The results of this research shows that in the implementation of electronic parking in Surakarta City is based on the appeal from the Ministry of Home Affairs who has issued the Circular Letter of the Ministry of Home Affairs Number 910/1867/SJ concerning about Implementation Non-Cash Transaction at District / City Government. Obstacles that happens in the implementation of electronic parking in Surakarta City, includes: 1) Haven't been yet established due to governing regulations regarding electronic parking in Surakarta City; 2) Electronic parking machines sometimes doesn't work properly; 3) Lack of socialization by the Surakarta City Government and the Transportation Department Communication and Information about the implementation of electronic parking in Surakarta City; last 4) There are still too many people who doesn't have electronic money cards that are used as a tool for parking tariff payment transactions. The solution to these problems, Surakarta City Government has to make Regional Regulation of Surakarta City or Surakarta Mayor Regulation to regulate electronic parking in Surakarta City; and conducts socialization about electronic parking to communities and conduct evaluation and supervision of the implementation of electronic parking in Surakarta City.

Key Words : *policy, electronic parking, regional own-source revenue*